



Judul : RAPBN dan RKP 2018 Disepakati
Tanggal : Kamis, 06 Juli 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 17

RAPBN dan RKP 2018 Disepakati

Kerangka makro yang diusulkan pemerintah selanjutnya dapat dibawa dalam rapat paripurna.

TESA OKTIANA SURBAKTI
Tesa@mediaindonesia.com

BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi makro dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Dengan begitu, kerangka makro yang diusulkan pemerintah selanjutnya dapat dibawa dalam rapat paripurna.

"Berdasarkan laporan panja (panitia kerja) tidak terdapat catatan. Sudah ada konklusi bahwa perlu mendapatkan pengesahan agar bisa dibawa ke-rapat paripurna pada 11 Juli nanti," ujar Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin dalam rapat kerja bersama pemerintah, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI DPR menetapkan asumsi makro dalam RAPBN 2018 dengan rincian pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6%, inflasi 3,5 plus-minus 1%, dan nilai tukar yang dipatok 13.300-13.500 per dolar AS.

Suku bunga SPN 3 bulan dipatok 4,8%-5,6%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$45-US\$60 per barel, *lifting* minyak bumi 771-815 ribu barel per hari (bph) dan *lifting* gas bumi 1.194-1.235 barel setara minyak per hari (bopd).

Rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, kemarin, turut membahas dan menyepakati empat agenda berdasarkan hasil panitia kerja (panja), di antaranya Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan. Selanjutnya, Panja RKP dan Prioritas Anggaran 2018 dan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat. Terakhir,

Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Adapun mengenai RKP 2018, parlemen menggarisbawahi urgensi dari vaksinasi terhadap balita dan anak dalam prioritas program kesehatan nasional. Poin lain yang menjadi atensi ialah mengenai ketahanan pangan. Pemerintah diminta mengendalikan harga dan stok komoditas bawang putih. "Mengenai ketahanan pangan, tidak hanya bawang merah, tetapi juga perlu ditambah bawang putih karena Indonesia banyak impor," usul Azis.

Dalam menanggapi usul tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menuturkan, pada prinsipnya pemerintah tidak keberatan menambahkan prioritas kesehatan dengan sasaran vaksinasi balita dan anak. Begitu pula terhadap usul pengendalian komoditas bawang putih. "Namun, Kita harus berkoordinasi dengan menteri pertanian, apakah benar-benar menjadi sasaran umum. Intinya kita tidak keberatan mengakomodasi usulan Banggar DPR."

Utang swasta

Dari laporan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, parlemen mengusulkan adanya penambahan kewajiban pemerintah menjaga stabilitas utang pemerintah dan swasta. Mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan, baik pemerintah maupun DPR perlu berhati-hati dalam penyusunan kalimat kewajiban pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah dan swasta lantaran berpotensi berdampak serius. Dalam hal ini pihaknya khawatir timbul preseden bahwa pemerintah berkewajiban menanggung utang swasta tanpa bisa mengklaim keuntungan yang diperoleh. (E-2)